

Analisis Kaitan Angka Beban Ketergantungan dengan Indeks Pembangunan Manusia dalam Pemanfaatan Bonus Demografi (Studi 6 Provinsi Indonesia)

Suparna Parwodiwiyono¹, Witono²

¹Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta,

²Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

Corresponding Author: Email: parno987@gmail.com

Abstrak

Angka beban ketergantungan (ABK) merupakan indikator adanya momentum bonus demografi. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perkembangan dan kaitan kesempatan bonus demografi dengan peningkatan pembangunan manusia di 6 provinsi terpilih. Enam provinsi terpilih tersebut yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili ABK rendah. Sumatera Selatan dan Bengkulu mewakili ABK sedang. Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur mewakili ABK tinggi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif. Terdapat perbedaan perkembangan ABK pada tiga kategori daerah penelitian. Daerah dengan ABK rendah cenderung naik, sedangkan daerah dengan ABK tinggi cenderung menurun pada periode 2010-2040. Terlihat ada kecenderungan bahwa daerah dengan ABK rendah memiliki nilai indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, sementara daerah dengan ABK tinggi memiliki nilai IPM yang relatif rendah. Upaya memanfaatkan bonus demografi dioptimalkan melalui peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kebijakan yang berfokus dan dapat mendukung tercapainya manfaat bonus demografi memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Selain itu perlu didukung kebijakan kependudukan dalam pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, dan mengarahkan mobilitas.

Kata Kunci: Bonus demografi, penduduk produktif, pembangunan manusia

Abstract

The dependency ratio (DR) is an indicator of the demographic bonus. This paper aims to obtain of the development and relationship of demographic bonus with human development in 6 selected provinces. The six selected provinces, namely DKI Jakarta and Yogyakarta Special Region, represented low DR members. Sumatra Selatan and Bengkulu represent medium DR. Sulawesi Tenggara and Nusa Tenggara Timur represent high DR members. This study uses secondary data from the publications of the Statistics Indonesia. Data analysis is descriptive quantitative. There are differences in the development of DR in the three categories of areas. Regions with low DR tend to increase, while regions with high DR tend to decline in the 2010-2040 period. Regions with lower DR have a high value of the human development index (HDI), while regions with higher DR have a relatively low HDI value. The demographic bonus is optimized through quality improvement in the fields of education, health, and economy. Policies that are focused and can support of the demographic bonus require special attention from local governments. In addition, it is necessary to support population policies in controlling quantity, developing quality, and directing mobility.

Kata Kunci: Demographic bonus, productive population, human development

Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) mencapai 270,2 juta jiwa (BPS, 2020). Angka ini meningkat bila dibandingkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebanyak 237,6 juta jiwa. Bila diperhatikan jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) terdapat sekitar 187 juta jiwa (69,3 persen), jauh lebih banyak dibandingkan dengan persentase penduduk tidak produktif (usia 0-14 tahun dan di atas 64 tahun) yang hanya 30,7 persen. Hasil SP2020 juga menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami transisi kependudukan dan masuk dalam masa bonus demografi (Maryati et al., 2021).

Bonus demografi sering diistilahkan juga dengan *window of opportunity* (Rahel, 2021), (S. Das et al., 2022). Bonus demografi merupakan peluang penduduk suatu wilayah untuk berkembang, disebabkan besarnya persentase penduduk usia produktif dalam transisi kependudukan (Wongboonsin et al., 2020). Jika penduduk tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal, maka akan menjadi anti bonus atau bencana demografi (Jati, 2015), (Tacona & Metian, 2021). Bonus demografi yang terjadi akibat perubahan struktur penduduk mempunyai implikasi terhadap pembangunan (Ray, 2007).

Untuk memajukan kualitas penduduk dan memperoleh masyarakat sejahtera pada momentum/masa bonus demografi, bisa didapatkan jika penduduk usia produktif mendukung dan berkontribusi pada pembangunan negara. Jika suatu negara tidak dapat memanfaatkan bonus demografi, maka akan merupakan kerugian besar bagi negara yang bersangkutan. Bonus demografi dapat dinikmati dengan memerlukan usaha bersama dari semua lapisan masyarakat dan instansi terkait, termasuk membutuhkan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan. (Zulkarnain et al., 2022). Niat pemanfaatan bonus demografi di Indonesia tercatat dalam Nawacita pemerintahan saat ini, yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup. Melalui Nawacita kelima tersebut, dapat terlihat komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia yang tinggi.

Periode masa bonus demografi Indonesia ditengarai terjadi pada tahun 2020-2040 dengan *dependency ratio* (angka beban ketergantungan) berkisar antara 40-50. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang usia produktif memiliki beban tanggungan 40-50 orang usia tidak produktif (Setiawan, 2018), (Ginting, 2016). Berdasarkan SP2020 angka beban ketergantungan pada tahun tersebut sebesar 44. Jadi, pada periode 2020-2040, bangsa Indonesia berkesempatan besar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penduduk. Produktivitas yang meningkat akan memberikan dampak pada naiknya tingkat kesejahteraan serta kualitas penduduk hingga berpuluh-puluh tahun kemudian (Sutikno, 2020).

Berdasarkan paradigma pembangunan yang berkembang sampai saat ini, tolok ukur keberhasilan pembangunan telah bergeser dari model pertumbuhan ekonomi ke model pembangunan manusia. Dalam konsep terakhir, manusia dipandang sebagai sasaran akhir. Pembangunan dilihat sebagai upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Pengembangan manusia atau Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan upaya meningkatkan kemampuan dasar penduduk dan memperluas kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Kemampuan dasar yang dimaksud meliputi tiga nilai utama keberhasilan pembangunan, yaitu kecukupan (*sustenance*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*selfsteem*) (Todaro & Smith, 2003), (UNDP, 2020).

Salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan manusia suatu negara atau wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Pemerintah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kualitas pembangunan manusia (Tacona & Metian, 2021). Dengan penerapan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan lebih banyak dalam meningkatkan kualitas SDM di tangan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas penduduk diharapkan lebih baik dari sisi fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan), kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), maupun

moralitas (iman dan ketaqwaan). Dengan demikian peran serta penduduk dalam pembangunan dengan sendirinya akan meningkat.

Hanya saja tahapan momentum bonus demografi sangat bervariasi antar wilayah (Dmitrieva, 2021). Di Indonesia tahapan momentum/masa bonus demografi juga sangat bervariasi antar wilayah. Angka beban ketergantungan suatu wilayah bisa menjadi indikasi yang baik tahapan momentum bonus demografi tersebut. Pada penelitian ini dipilih 6 provinsi di Indonesia dengan perkembangan masa bonus demografi yang berbeda, yaitu berdasarkan perbedaan kategori angka beban ketergantungan penduduk pada setiap provinsi sebagai gambaran variasi. Enam provinsi terpilih masing-masing dengan angka beban ketergantungan dua terendah, dua tertinggi, dan dua provinsi di tengah yaitu rangking 17-18 dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2020. Dengan mengambil dua provinsi tersebut diharapkan cukup mewakili secara metodologi.

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat tiga kelompok teori kependudukan dan pembangunan yang dapat diacu: (1) aliran Malthusian; (2) aliran Marxist; dan (3) Aliran Neo-Malthusian (Mantra, 2008). Aliran Malthusian menyebutkan bahwa antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi makanan terjadi ketidakseimbangan. Sementara aliran Marxist menganggap pertumbuhan penduduk lebih tergantung pada kondisi sosial ekonomi dari setiap golongan masyarakat. Mortalitas dan fertilitas yang berbeda di dalam kelas sosial atau di dalam kelas pekerja, akan dipengaruhi oleh kedudukan dan kondisi sosial, tingkat hidup, dan lain-lain. Sedangkan aliran Neo-Malthusian mempertimbangkan peran adopsi teknologi dalam tanggapan perkembangan penduduk (Munir & Budiarto, 1986). Aliran terakhir dapat diacu karena percaya pembatasan kelahiran dan perbaikan teknologi kesehatan menjadi hal penting terjadinya transisi demografi, sehingga suatu saat akan diperoleh angka beban ketergantungan terendah di suatu wilayah, yang menggambarkan momentum/tahapan bonus demografi. Kesempatan yang muncul tersebut harus dimanfaatkan dengan kualitas penduduk yang memadai, karena tidak dapat terulang dalam waktu singkat.

Dengan demikian urgensi kajian bonus demografi dikaitkan dengan IPM perlu dilakukan karena: 1) Momentum/masa bonus demografi merupakan indikator tahapan pembangunan kependudukan. 2) Angka beban ketergantungan merupakan ukuran atau indikator capaian bonus demografi. 3) Gambaran momentum/masa bonus demografi dan kaitannya dengan IPM dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam merencanakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan pembangunan kependudukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pada 6 provinsi terpilih terkait: 1) Momentum/masa bonus demografi sampai dengan tahun 2040. 2) Keterkaitan/hubungan antara momentum bonus demografi dengan capaian IPM. 3) Rekomendasi strategi/kebijakan pembangunan kependudukan. Provinsi terpilih ini diharapkan dapat menggambarkan perbedaan momentum/masa bonus demografi, apakah pada tahap akhir, sedang berlangsung, atau baru memasuki tahapan momentum/masa bonus demografi.

Metode Penelitian

Penggunaan angka beban ketergantungan sebagai indikator peluang terjadinya bonus demografi sudah pernah dilakukan (Astuti & Soetarmiyati, 2016), (Putro & Setiawan, 2013). Angka beban ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk berusia 65 tahun ke atas, dengan jumlah penduduk umur 15 sampai 64 tahun. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit. IPM disusun dari unsur peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), standar hidup layak (*living standards*). Angka harapan hidup ketika lahir sebagai indikasi dari peluang hidup. Rata-rata harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas sebagai ukuran pengetahuan. Sementara pengeluaran per kapita distandarkan atau paritas daya beli (*purchasing power parity*) digunakan sebagai ukuran dari standar hidup layak (BPS, 2021). ABK dengan IPM relevan dan merupakan indikator baku

yang digunakan sebagai dasar analisis keterkaitan dalam upaya pemanfaatan bonus demografi.

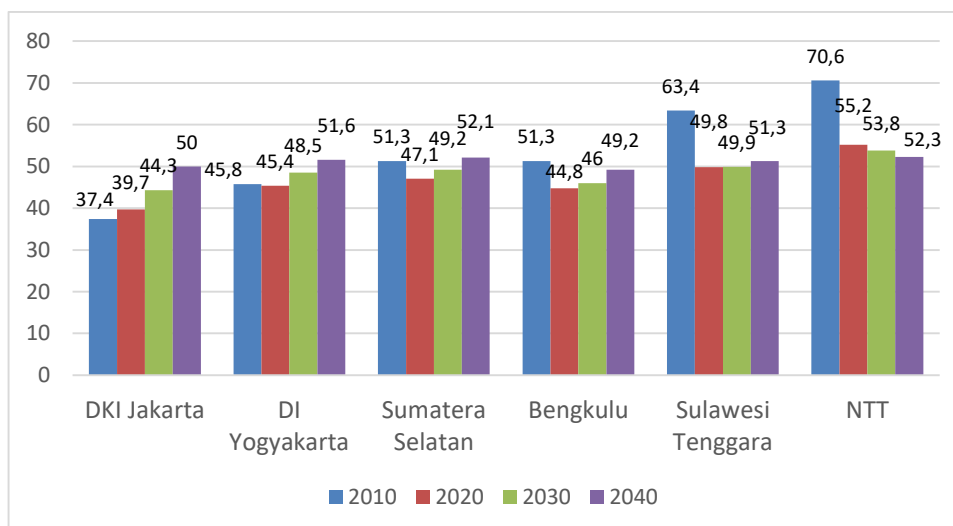
Sumber data penelitian berasal dari data sekunder dengan menggunakan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk *time series* serta literatur pendukung. Keterbatasan penelitian ini datanya bergantung pada ketersediaan variabel yang sudah terpublikasikan dan sebagian masih hasil proyeksi. Sedangkan kelebihan penelitian ini berupa ABK dan IPM merupakan hasil perhitungan secara ilmiah oleh lembaga yang terpercaya. Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Enam provinsi terpilih analisis berdasarkan pertimbangan dua provinsi dengan rangking angka beban ketergantungan rendah, sedang, maupun tinggi. Enam provinsi tersebut yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta sebagai daerah dengan angka beban ketergantungan dua terendah. Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan angka beban ketergantungan rangking 17-18 atau sedang di Indonesia. Sementara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dipilih karena memiliki angka beban ketergantungan dua terbesar di Indonesia. Dengan demikian variasi tahapan momentum/masa bonus demografi bisa terwakili dan tergambarkan secara lengkap. Enam provinsi terpilih ini diharapkan bisa mewakili terjadinya variasi tahapan/momentum bonus demografi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Momentum Bonus Demografi

Terdapat perbedaan kecenderungan perkembangan angka beban ketergantungan pada ketiga kategori daerah penelitian. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebagai wilayah yang mempunyai angka beban ketergantungan kecil, tampak angka beban ketergantungan memiliki kecenderungan meningkat pada periode 2010-2040. Sementara Sumatera Selatan dan Bengkulu yang memiliki angka beban ketergantungan kategori menengah/sedang tampak angkanya relatif tidak berubah. Sebaliknya untuk Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dengan angka beban ketergantungan kategori tinggi, tampak angkanya cenderung semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi perkembangan angka beban ketergantungan antar daerah-daerah di Indonesia. Selain itu juga terdapat perbedaan tahapan dalam bonus demografi (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat daerah-daerah yang sudah pada tahap akhir masa bonus demografi, tetapi juga terdapat daerah-daerah yang baru mau memasuki masa bonus demografi. Dengan demikian perlu perbedaan dalam menyikapi dan membuat kebijakan masa bonus demografi sesuai dengan perkembangan di wilayah masing-masing.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar di berbagai provinsi di Indonesia tersebut telah menimbulkan peluang adanya bonus demografi. Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta telah mengalami momentum bonus demografi sejak 2010. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa angka beban ketergantungan di dua provinsi tersebut pada tahun 2020 berkisar pada angka 40 dan 45. Keadaan pada kedua provinsi ini sudah menampakkan akan meninggalkan masa bonus demografi pada 2040, sehingga perlu peringatan dini (*warning*) sejak sekarang. Jendela peluang yang ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan rendah, telah menciptakan harapan untuk peningkatan produktivitas dan pembangunan manusia di wilayah yang bersangkutan. Sementara di Sumatera Selatan dan Bengkulu baru memasuki momentum bonus demografi sejak tahun 2020. Terlihat angka beban ketergantungannya tidak banyak turun lebih rendah lagi, sehingga masih berharap masa bonus demografinya lebih panjang. Untuk Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur yang pada tahap awal/belum memasuki masa bonus demografi masih perlu dipikirkan cara agar bisa menikmati masa bonus demografi lebih cepat (Mukri, 2018), (Ginting, 2016).



Gambar 1. Angka beban tanggungan di 6 provinsi terpilih, 2010-2040

Pemerintah harus benar-benar memanfaatkan bonus demografi di Indonesia yang secara umum terjadi pada periode 2020 hingga 2040. Pemerintah yang siap dalam memanfaatkan bonus demografi tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jumlah tenaga produktif yang melimpah akan mendapatkan produktivitas yang tinggi di wilayah tersebut dan bahkan menjadi incaran negara-negara maju yang kekurangan tenaga produktif. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang akan mendapatkan keuntungan dari adanya bonus demografi selain India dan Tiongkok, karena jumlah penduduk usia produktif yang banyak. Jika strategi pembangunan yang memanfaatkan momentum bonus demografi bisa dijalankan dengan tepat maka keuntungan akan didapatkan negara ini (Singh, 2012), (T. Das & Roy, 2021).

Akan tetapi pemerintah perlu memperhatikan variasi tahapan transisi demografi agar tidak terdapat wilayah yang tidak begitu menikmati bonus demografi, seperti Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur. Pada masa bonus demografi dapat diartikan akan terdapat kondisi di mana jumlah angkatan kerja akan banyak dan jika dapat mengelolanya dengan baik, maka akan mempercepat kemajuan dan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Penanganan penduduk dengan intervensi spesifik, strategis, dan tidak sama antar daerah (*one size fits all*) diperlukan untuk mengatasi variasi yang ada.

Pergeseran dalam distribusi umur penduduk dan angka beban ketergantungan yang bergerak turun akan membuat keadaan ideal untuk mendapatkan potensi terjadinya bonus demografi. Jumlah penduduk usia kerja akan meningkat dan jumlahnya hampir dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun. Pada kasus 6 provinsi terpilih persentase penduduk usia 5-14 tahun pada 2010-2020 akan segera masuk usia produktif di tahun 2020-2040 terdapat sekitar 15-20 persen yang masih perlu perhatian. Yang satunya juga terdapat penduduk yang menjelang tidak produktif. Hal ini tampak dari persentase penduduk usia 55-64 tahun pada 2010-2020 akan segera masuk non produktif pada 2020-2040 (5-11 persen). Jadi pada saat seperti ini merupakan tahapan paling mudah dalam investasi dan pembiayaan yang murah dalam pelayanan dasar bagi anak di bawah 15 tahun. Tabungan masyarakat akan meningkat hasil dari pendapatan pekerja usia produktif, lalu dapat diinvestasikan pada kegiatan produktif sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas penduduk.

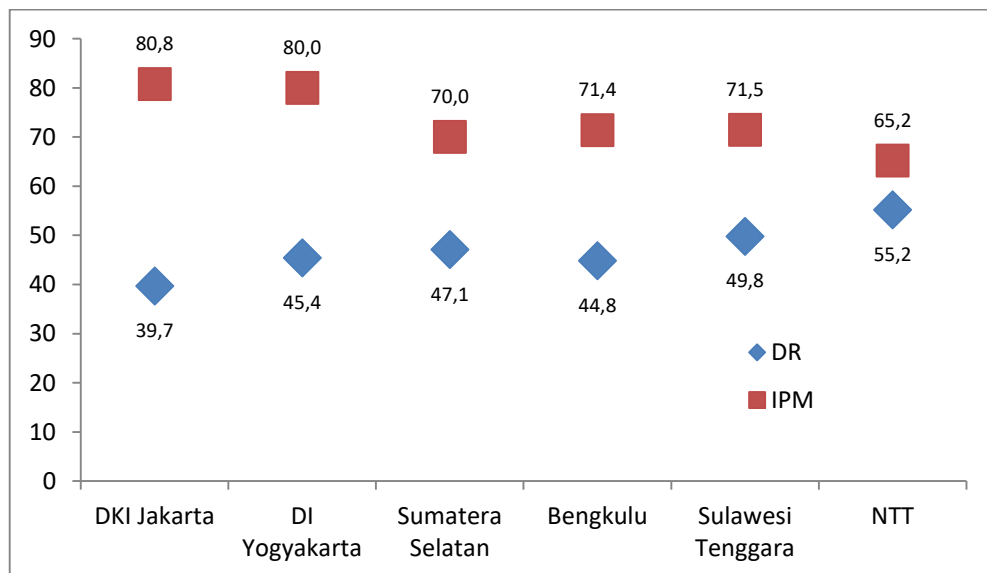
Dengan tingkat kelahiran dan kematian yang terus menurun, serta dalam tahapan bonus demografi, maka kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. Gambaran kualitas penduduk selama ini ditunjukkan dengan nilai IPM. Hanya saja kebijakan pemerintah selama ini tampak masih setengah hati, dan momentum bonus demografi perlu dioptimalkan. Perekonomian Indonesia saat ini

tumbuh dengan dominasi dari hasil konsumsi penduduk kelas menengah. Konsumsi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas, sehingga perekonomian Indonesia bisa terhindar dari jebakan negara dengan penghasilan menengah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut ada 4 mekanisme penting yaitu dengan mempertimbangkan penawaran tenaga kerja, meningkatkan peran wanita, penambahan tabungan, dan peningkatan kualitas SDM (Jati, 2015). Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas (termasuk wanita) akan dimanfaatkan secara maksimal dalam pasar kerja, sehingga penghasilan dan tabungan akan meningkat. Dengan demikian peran penduduk usia produktif akan optimal.

2. Hubungan Momentum Bonus Demografi dengan IPM

Gambar 2. menunjukkan gambaran kaitan antara angka beban ketergantungan dengan IPM di 6 provinsi terpilih tahun 2020. Terlihat ada kecenderungan bahwa daerah dengan angka beban ketergantungan rendah memiliki nilai IPM yang tinggi, sementara daerah dengan angka beban ketergantungan tinggi memiliki nilai IPM yang relatif rendah. Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki angka beban ketergantungan tahun 2020 sebesar 39,7 dan 45,4 dengan nilai IPM masing-masing secara berurutan mencapai 80,8 dan 80,0. Sementara Nusa Tenggara Timur yang memiliki angka beban ketergantungan sebesar 55,2 memiliki nilai IPM 65,2. Beruntung untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki angka beban ketergantungan sebesar 49,8 (kedua terbesar di Indonesia) memiliki nilai IPM mencapai 71,5. Nilai IPM Provinsi Sulawesi Tenggara ini lebih tinggi dari pada nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu dengan angka beban tanggungan yang berada pada level tengah di Indonesia. Hal ini dapat diartikan bahwa memasuki dan pemanfaatan bonus demografi akan lebih terasa bila memiliki IPM yang lebih baik.

Hasil uji statistik juga mendukung terdapatnya hubungan yang berlawanan arah antara angka beban ketergantungan dengan IPM tersebut. Berdasarkan data panel angka beban ketergantungan dan IPM pada 2010-2020 didapatkan hasil korelasi Spearman sebesar -0,862 yang signifikan dengan *p-value* di bawah 0,001. Dengan demikian dapat diartikan semakin kecil angka beban ketergantungan, maka IPM akan semakin tinggi.



Gambar 2. Angka beban tanggungan dan IPM di 6 provinsi terpilih, 2020

Pembangunan manusia merupakan suatu upaya untuk memperluas pilihan bagi penduduk (UNDP, 2020). Hal ini berarti bahwa pilihan yang lebih banyak perlu diberikan pada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk memperluas pilihan manusia terdapat tiga hal dasar yang penting, yaitu umur panjang dan sehat, memperoleh ilmu dan pengetahuan, dan dapat mengakses sumber daya

yang diperlukan. Apabila tiga hal tadi tidak dapat dipenuhi, maka kesempatan lain akan banyak yang tidak tercapai, misalnya kemerdekaan pilihan politik, derajat sosial, serta peluang untuk memperoleh tingkat produktivitas yang baik, memiliki rasa hormat dan terpenuhinya hak-hak azasi manusia.

Pembangunan manusia juga mempunyai dua sifat penting, yaitu pemberdayaan manusia dan penggunaan hasil pemberdayaan tersebut untuk kehidupan yang lebih layak. Pendapatan yang baik merupakan salah satu pilihan manusia, dan mungkin termasuk yang terpenting. Akan tetapi kemajuan penduduk lebih bergantung pada cara menggunakan dari pendapatan tersebut, tidak memperdulikan seberapa besar tingkat pendapatan. Berdasarkan pengalaman beberapa negara dapat dilihat bahwa pembangunan manusia yang cukup tinggi dapat ditemui pada negara yang pendapatannya masih tingkat menengah. Akan tetapi pembangunan manusia yang rendah juga didapatkan di negara yang pendapatannya sudah relatif tinggi. Dengan demikian tidak selalu terdapat hubungan antara pendapatan yang tinggi dengan pembangunan manusia yang baik. Hal ini juga terlihat dari kasus DI Yogyakarta yang memiliki nilai IPM tinggi, walaupun pendapatannya tidak tinggi dengan tingkat kemiskinan serta ketimpangan yang relatif tinggi. DI Yogyakarta bisa mendapatkan momentum bonus demografi lebih awal, sehingga bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir. Optimalisasi pemanfaatan momentum bonus demografi bisa diperoleh bila memiliki nilai IPM yang lebih baik. Daerah yang sudah berada pada masa bonus demografi lebih awal memiliki nilai IPM yang relatif lebih tinggi.

3. Kebijakan Pembangunan Kependudukan ke Depan

Dasar pemikiran konsep pembangunan manusia dapat diadopsi untuk memanfaatkan bonus demografi pada daerah dengan IPM masih rendah yang meliputi beberapa hal terkait pembangunan manusia: 1) Berfokus untuk kepentingan rakyat. 2) Berguna untuk memperluas kesempatan partisipasi dari masyarakat. 3) Perlu upaya untuk dapat memanfaatkan kemampuan penduduk secara maksimal. 4) Perlu didorong peningkatan dalam produktifitas, kesinambungan program, pemerataan hasil, dan upaya pemberdayaan; 5) Dapat digunakan sebagai landasan dalam penentuan arah pembangunan, melakukan analisis kebijakan agar pemanfaatan bonus demografi bisa lebih optimal.

Untuk daerah dengan ABK dan IPM pada tingkat menengah perkembangan perekonomian perlu diimbangi dengan upaya pemerataan dari hasil pembangunan, atau pembangunan harus bersifat inklusif (Bappenas et al., 2018). Kesamaan kesempatan perlu dijaga bagi generasi saat ini dengan mengingat generasi selanjutnya. Laki-laki maupun perempuan perlu diberdayakan lebih baik untuk terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang akan mempengaruhi masa depan mereka (BPS, 2021).

Untuk daerah dengan ABK rendah dan IPM tinggi dengan fasilitas infrastruktur yang memadai dan akan meninggalkan momentum bonus demografi, maka kemiskinan secara multi dimensi dan kesenjangan pendapatan perlu perhatian khusus. Jangan sampai terdapat penduduk yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Oleh karena itu perlu diyakinkan bahwa seluruh penduduk dapat terlibat dalam peningkatan kualitas penduduk dan perluasan pilihan semakin baik (Bappenas et al., 2018), (BPS, 2021), (BKKBN, 2020).

Hanya saja perlu diingat bahwa IPM terdiri dari tiga unsur penting, sehingga IPM perlu dipandang sebagai penyederhanaan dari sisi pembangunan manusia yang sangat kompleks dan luas. Dengan demikian penelitian ini masih perlu didukung dengan penelitian dan kajian lebih lanjut yang dapat menjelaskan sisi pembangunan manusia yang belum tercakup, seperti kebebasan berpolitik, keberlanjutan dan pemerataan pembangunan antar generasi (tidak seluruhnya dapat diukur).

Faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan manusia di 6 provinsi ini adalah munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran penduduk. Penduduk usia produktif akan berkumpul di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sementara penduduk usia non produktif cenderung berpindah menjauh dari pusat pertumbuhan tersebut. Selain itu pengaruh pandemi Covid-

19 yang sebelumnya membatasi pergerakan penduduk, juga perlu diperhatikan perkembangannya dalam upaya optimalisasi bonus demografi (Pantjoro, 2021).

Untuk mendapatkan makna optimalisasi bonus demografi terhadap pembangunan manusia perlu didukung para pengambil kebijakan, media masa, dan lembaga penggerak lain dalam mengalihkan perhatian dengan lebih menekankan pada peningkatan kualitas penduduk. Selain itu pilihan-pilihan kebijakan pemerintah daerah perlu dipertajam pada hal-hal yang mengarah optimalisasi bonus demografi.

Dari perkembangan persentase penduduk usia 5-14 tahun (segera memasuki usia produktif) pada 6 provinsi terpilih, memperlihatkan kecenderungan menurun lebih lambat daripada yang diperkirakan sebelumnya. Hal ini menyebabkan potensi keuntungan yang berasal dari transisi demografi akan lebih kecil dibandingkan dengan negara lain di Asia, terutama negara-negara dengan tingkat pembangunan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan adanya bonus demografi diperlukan upaya yang lebih keras pada wilayah tersebut.

Pemanfaatan bonus demografi terasa menjadi maksimal dan nyata terutama bagi wilayah yang masih dalam tahapan awal bonus demografi bila memenuhi beberapa syarat, yakni: 1) terdapat sumber daya manusia yang berkualitas. 2) tenaga kerja bisa terserap di pasar kerja. 3) tabungan penduduk yang meningkat. 4) proporsi perempuan yang meningkat dalam pasar kerja. Agar peningkatan jumlah penduduk usia produktif menjadi peluang yang menjadi kenyataan dan tidak malahan menjadi ancaman bagi keberlanjutan pembangunan bila keempat hal tersebut mendapatkan perhatian. Bidang kependudukan akan terpengaruh pula bila terdapat gangguan dalam standar kehidupan masyarakat dan daya beli yang menurun (Astuti & Soetarmiyati, 2016).

Terdapat tiga hal penting dalam mendukung optimalnya pemanfaatan bonus demografi dan sesuai diterapkan di 6 provinsi terpilih terkait kependudukan. Ketiga hal tersebut yaitu penguatan fungsi keluarga, manajemen perencanaan pembentukan keluarga yang perlu ditata kembali, dan perbaikan kualitas penduduk dan keluarga terus ditingkatkan melalui jalur Program Bangga Kencana (BKKBN, 2020), (Rahel, 2021), (Ginting, 2016). Perbaikan kualitas penduduk dan keluarga akan sangat bermanfaat dalam memasuki pasar kerja, produktif bekerja, dan meningkatkan pendapatan.

Pengembangan pendidikan yang merupakan salah satu unsur utama IPM masih memerlukan perhatian khusus di 6 provinsi terpilih. Persoalan terbesar dari pendidikan adalah masih kurangnya pengertian akan pentingnya pendidikan, terutama untuk dirinya. Apabila penduduk sudah mempunyai paham yang baik terkait pendidikan akan mudah menyesuaikan diri dan berpandangan luas. Dengan peningkatan kualitas pendidikan akan mendapatkan kualitas SDM yang lebih baik juga. Dengan pendidikan akan didapatkan peningkatan kapasitas dalam beradaptasi, adopsi teknologi internet, memiliki toleransi, trampil bernegosiasi, mampu berkomunikasi, pemikiran yang terbuka, dan meningkat kemampuan dalam melakukan kajian.

Program pengembangan potensi sumber daya penduduk mau masuk usia produktif atau pendidikan masih menjadi andalan untuk kemajuan daerah, agar lapangan pekerjaan dapat terserap secara optimal (Mukri, 2018). Strategi pembelajaran di abad ke-21 yang perlu diacu dan meliputi beberapa hal: 1) Variasi dalam aktivitas belajar. 2) Untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dan penggunaannya yang baik. 3) Kasus lokal dalam pembelajaran perlu diperbanyak. 4) Cara mengajar yang menekankan pada hafalan bagi peserta didik harus ditinggalkan. 5) Perlunya menjaga semangat belajar dan pola pikir terbuka. 6) Kemampuan adopsi media informasi. 7) Peserta didik memperoleh pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kehidupan nyata. 8) Kurikulum yang sesuai dengan kompetensi siswa (Baroya, 2018).

Kualitas SDM juga dipengaruhi kualitas kesehatan. Terdapat prioritas kebijakan yang bisa dipilih di bidang kesehatan untuk mengoptimalkan bonus demografi, yaitu: kesehatan anak balita, kesehatan reproduksi wanita, dan jaminan kesehatan. Pemerintah daerah harus memperhatikan kelangsungan hidup dari bayi yang lahir. Selain itu kandungan gizi dan nutrisi bagi anak perlu dipastikan agar tumbuh kembang tidak bermasalah. Program

kesehatan reproduksi bagi perempuan remaja perlu dipertajam. Kondisi organ reproduksi pada perempuan usia reproduksi agar dijaga untuk dapat melahirkan bayi seperti yang diharapkan. Gizi dan nutrisi pada anak perlu terus diperbaiki, karena akan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif pada masa selanjutnya. Program jaminan kesehatan perlu terus diperluas cakupannya. Tenaga kerja yang mau masuk ke pasar kerja juga perlu dimasukkan dalam program jaminan kesehatan. Dengan demikian bila mereka terserap dalam pasar kerja akan optimal dan selalu produktif.

Untuk meraih manfaat bonus demografi terutama pada daerah dengan IPM masih rendah, angka kelahiran tetap harus dapat dikendalikan. Laju pertumbuhan penduduk perlu terus ditekan mendekati *replacement level*, terutama dengan program pengendalian kelahiran. Upaya yang dapat dilakukan dengan terus melakukan sosialisasi pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Kehamilan yang terjadi merupakan hasil perencanaan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan orang tua. Apabila laju pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan karena adanya peningkatan angka fertilitas, maka angka beban ketergantungan akan cenderung meningkat. Hal ini akan mengganggu kemampuan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi serta akan mengurangi peran wanita di dunia kerja karena harus berkuat dalam kegiatan domestik di keluarga. (Muhaemin, 2021).

Dengan demikian perlu dibentuk adanya gerakan bersama dalam melakukan sosialisasi, menentukan strategi, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki di 6 provinsi terpilih untuk memanfaatkan peluang bonus demografi. Pemanfaatan bonus demografi pada pembangunan penduduk baik dari aspek kualitas maupun kuantitas menjadi pusat perhatian. BKKBN yang merupakan institusi dengan fungsi koordinasi selama ini perlu dioptimalkan. Kebijakan yang serasi dan harmonis tentunya perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik antar sektor-sektor yang memiliki fungsi pencapaian sasaran terutama dalam pengendalian jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, anak, serta pemuda.

Pembangunan kependudukan di 6 provinsi terpilih perlu diletakkan dalam konteks pengarusutamaan pembangunan SDM. Pembangunan yang memandang manusia sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Pendekatan pembangunan dilakukan mengikuti alur siklus hidup manusia (*life cycle approach*). Kebijakan pembangunan kependudukan yang dapat diaplikasikan meliputi beberapa hal terkait, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, mobilitas penduduk, perbaikan statistik dan informasi terkait penduduk, serta kebijakan yang serasi antar wilayah dan antar waktu.

Upaya segera yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mempercepat dalam memanfaatkan momentum bonus demografi di 6 provinsi terpilih penelitian yaitu implementasi masif pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72/2021. Implementasi terutama pada: 1) Percepatan penurunan stunting dengan mengedepankan penanganan lebih ke hulu. 2) Bimbingan perkawinan dan pengaturan kehamilan berkualitas. 3) Meningkatkan kualitas fertilitas dan menurunkan fertilitas. 4) Menurunkan persentase penduduk usia 0-14 tahun. 5) Meningkatkan usia harapan hidup. 6) Meningkatkan nilai IPM. Kemudian upaya yang tidak boleh dilupakan berupa pengendalian penyakit infeksi dengan mengejar Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) hingga 90 persen, pengendalian TBC hingga serendah mungkin (Perpres Nomor 67/2021), serta pengendalian penyakit tidak menular. Di samping itu perlu juga menumbuhkan pusat ekonomi baru sebanyak mungkin, disinkronkan dengan pengembangan pendidikan vokasi, memberi peran/ruang bekerja lebih banyak pada perempuan, dan menambah ketrampilan penduduk usia produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi terkini (BKKBN, 2022). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Stunting Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 misalnya, banyak yang masih relevan terkait dengan maksud dari Peraturan Presiden tersebut.

Kesimpulan

Terdapat perbedaan kecenderungan perkembangan angka beban ketergantungan pada ketiga kategori daerah penelitian. DKI Jakarta dan DI Yogyakarta sebagai wilayah yang memiliki angka beban ketergantungan rendah, tampak cenderung meningkat pada periode 2010-2040. Sementara Sumatera Selatan dan Bengkulu yang memiliki angka beban ketergantungan kategori menengah/sedang tampak angkanya relatif tidak berubah. Sebaliknya untuk Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur dengan angka beban ketergantungan kategori tinggi, tampak angkanya cenderung semakin kecil. Terlihat ada kecenderungan bahwa daerah dengan angka beban ketergantungan rendah memiliki nilai IPM yang tinggi, sementara daerah dengan angka beban ketergantungan tinggi memiliki nilai IPM yang relatif rendah.

Terdapat tiga hal penting dalam mendukung optimalnya pemanfaatan bonus demografi dan sesuai diterapkan di 6 provinsi terpilih terkait kependudukan. Ketiga hal tersebut yaitu penguatan fungsi keluarga, manajemen perencanaan pembentukan keluarga, dan perbaikan kualitas penduduk dan keluarga. Kebijakan yang serasi dan harmonis tentunya diperlukan antar stakeholder yang terlibat, terutama berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Rekomendasi

Upaya memanfaatkan bonus demografi dilakukan melalui peningkatan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kebijakan yang berfokus pada perbaikan kualitas penduduk dan dapat mendukung tercapainya pemanfaatan bonus demografi memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Selain itu perlu didukung koordinasi yang kuat antar pemangku kepentingan pada kebijakan kependudukan dalam upaya pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, dan mengarahkan mobilitas. Program Kampung KB yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga bisa terus dikembangkan. Penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang perbaikan kualitas penduduk dan pemanfaatan bonus demografi sangat diperlukan.

Persantunan

Ucapan terima kasih disampaikan ke BPS yang telah mendukung dan mengizinkan pemanfaatan data untuk dilaksanakan analisis.

Referensi

- Astuti, H. W., & Soetarmiyati, N. (2016). Mengukur Peluang Dan Ancaman Bonus Demografi. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 2(01).
- Bappenas, BPS, & UNFPA. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045. In *BPS*. Bappenas, BPS, UNFPA.
- Baroya, E. P. I. H. (2018). Strategi Pembelajaran Abad 21 - Lpmp Jogja. *Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. DIYogyakarta*, 1(01), 101–115.
- BKKBN. (2020). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024* (p. 67).
- BKKBN. (2022). *Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI)*.
- BPS. (2020). *Potret Sensus Penduduk 2020 Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia*. BPS.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. BPS.
- Das, S., Guru, S. S., & Iyer, A. (2022). Forecasting Mortality Rates for India Using Lee-Carter Model with Applications to Projecting Population Pyramid, Gender Imbalance and Dependency Ratio. *SSRN Electronic Journal*, February, 0–20. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4037026>
- Das, T., & Roy, T. B. (2021). *India 's Demographic Dividend: Trends , Opportunities and Emerging Challenges* (Issue May 2020).
- Dmitrieva, Y. N. (2021). Differentiation of dependency ratio in Irkutsk oblast. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 629(1). <https://doi.org/10.1088/1755->

1315/629/1/012052

- Ginting, J. (2016, September 1). *Menyiasati Bonus Demografi Indonesia Tahun 2020-2030*. 1(9).
- Jati, W. R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia? *Populasi*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jp.8559>
- Mantra, I. B. (2008). Demografi Umum. In *UGM* (2nd ed.). Pustaka Pelajar.
- Maryati, S., Handra, H., & Muslim, I. (2021). Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Era Bonus Demografi di Sumatra Barat Labor Absorption and Economic Growth Towards the Demographic Bonus Era in West Sumatra. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(Januari), 95–107.
- Muhaemin, N. M. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat? *Jurnal Academia Praja*, 4(1), 201–222. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i1.269>
- Mukri, S. G. (2018). Menyongsong Bonus Demografi Indonesia. *'Adalah*, 2(6), 51–52. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8223>
- Munir, & Budiarto. (1986). *Teori-Teori Kependudukan (Terjemahan)*. Bina Aksara.
- Pantjoro, T. H. (2021). Covid -19 Pandemic, Disruption of Demographic Bonus and National Resilience. 9(2), 83–100.
- Putro, A. S., & Setiawan, A. H. (2013). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Upah Minimum Kota, Tingkat Inflasi Dan Beban/Tanggungan Penduduk Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kota Magelang Periode Tahun 1990-2010. *Diponegoro Journal of Economics*, 2(3), 1–14.
- Rahel, R. (2021, October 28). *Pengaruh Bonus Demografi terhadap Perekonomian Indonesia*. 1. <https://yoursay.suara.com/kolom/2021/10/28/081031/pengaruh-bonus-demografi-terhadap-perekonomian-indonesia%0ASaat>
- Ray, D. (2007). Development economics. In *New Palgrave Dictionary of Economics*. <https://doi.org/10.4337/9781785365065.00013>
- Setiawan, S. A. (2018). Mengoptimalkan Bonus Demografi untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 11–23.
- Singh, T. (2012). *Demographic Dividend in China, The Challenge Ahead* (Issue April).
- Sutikno, A. N. (2020). Bonus Demografi Di Indonesia. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 421–439. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.285>
- Tacona, A. G. J., & Metian, M. (2021). Future Feeds: Suggested Guidelines for Sustainable Development. *Reviews in Fisheries Science & Aquaculture*, 30(2), 135–142.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. In *Jakarta : Erlangga, 2003* (8th ed.). Erlangga.
- UNDP. (2020). The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. In *Human Development Report 2020*. <http://hdr.undp.org/en/2020-report>
- Wongboonsin, P., Aungsuroch, Y., & Hatsukano, N. (2020). The Ageing Society and Human Resources to Care for the Elderly in Thailand. In *Human Resources for the Health and Long-term Care of Older Persons in Asia* (Issue November, pp. 104–135). ERIA.
- Zulkarnain, T., Hazmi, Y., Nasir, M., Faisal, F., & Husin, D. (2022). Dynamic Response of Dependency Ratio on Government Expenditures in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 9(2), 71–79. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2022.vol9.no2.0071>